

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN SAMARINDA SMART CITY

Dody Kusuma Prayuda, Bambang Irawan, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Impelementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan Samarinda *Smart City*.

Pengarang : Dody Kusuma Prayuda

NIM : 1602015014

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 September 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si.
NIP 19760216 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. Fajar Apriani, M.Si.
NIP 1930414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 987-994	

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN SAMARINDA SMART CITY

Dody Kusuma Prayuda¹, Bambang Irawan², Fajar Apriani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penghambat implementasi Smart Governance dalam mewujudkan Samarinda Smart City. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Fokus Penelitian faktor penghambat implementasi Smart Governance dalam mewujudkan Samarinda Smart City. Adapun Key Informan penelitian ialah Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Kota Samarinda dan informan Penelitian berupa Tim Samarinda Smart City dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWUAP). Model analisa data yang digunakan ialah Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi Smart Governance dalam mewujudkan Samarinda Smart City terdiri dari dua faktor yakni: Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pemerintah Kota Samarinda. Faktor Internal Pemerintah Kota Samarinda merupakan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Smart Governance yang berasal dari lingkup internal Pemerintah Kota Samarinda, adapun yang diklasifikasikan sebagai faktor internal pemerintah kota samarinda ialah: Sumberdaya Operator kurang aktif, Ego sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan anggaran perawatan aplikasi/website yang tersedia, dan Kekurangan Sumberdaya Prasarana pendukung lainnya. Faktor Eksternal Pemerintah Kota Samarinda merupakan hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Smart Governance yang berasal dari lingkup eksternal Pemerintah Kota Samarinda, adapun yang diklasifikasikan sebagai faktor eksternal Pemerintah Kota Samarinda terdiri dari: Budaya Apatis Masyarakat dan Integrasi Layanan yang terhambat karena penyesuaian dengan Kebijakan Satu Data One Data.

Kata Kunci : *Smart Governance, Implementasi Smart Governance, Faktor Penghambat Implementasi Smart Governance*

Pendahuluan

Tahun 2017 Kota Samarinda terpilih sebagai salah satu dari 25 Kota tahap pertama pelaksanaan Program Gerakan 100 *Smart City*. Langkah awal yang

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dodykusumap@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan menerbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Masterplan Samarinda Smart City*. Kemudian Pemerintah Kota Samarinda melakukan pembangunan *Smart City* dengan memulai pada pembangunan pilar *Smart Branding* dan Pilar *Smart Governance*. Pilar *Smart Branding* yang dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda berupa revitalisasi Kawasan Citra Niaga yang dimulai dari tahun 2017-2018 dan penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik dengan meluncurkan layanan aplikasi dan website berupa: E-Kelurahan, E-Kecamatan, E-Warga, Perizinan *Online*, penyediaan layanan *Website* resmi pada seluruh OPD maupun instansi yang berada dilingkup Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan sebagai fondasi awal dalam membangun Pilar *Smart Governance* (*Blueprint Samarinda Smart City 2019-2021*).

Realisasi penerapan pilar *Smart Branding* dan *Smart Governance* dalam pembangunan Samarinda *Smart City* memberikan dampak positif. Adapun dampak positif yang dimaksud berupa hasil evaluasi *Smart City* yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018 menempatkan Kota Samarinda sebagai peringkat pertama dari 25 Kota yang terlibat dalam tahap pertama Gerakan 100 *Smart City* dengan nilai akhir 3,12 (Laporan Evaluasi Gerakan 100 *Smart City* Keminfo RI tahun 2018). Selain itu dengan penguatan Sistem Pemerintah Berbaiss Elektronik pada lingkup Pemerintah Kota Samarinda turut memberikan dampak positif, dimana Kota Samarinda ditetapkan sebagai Peringkat Pertama pada Peringkat Penguatan Manajemen Pengelolaan Teknologi dan Informasi Se-Kalimantan Timur Tahun 2018 oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (Laporan Peringkat Penguatan Manajemen TIK Kalimantan Timur 2018).

Namun pada Penerapan *Smart Governance* sebagai salah satu pilar Samarinda *Smart City* mengalami sejumlah masalah dan kendala. Adapun masalah dan kendala tersebut penulis dapatkan dari fakta yang dihimpun melalui tahap observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis tanggal 23 September 2019. Masalah-masalah yang dimaksud sebagai berikut: Permasalahan Pertama, Sosialisasi yang kurang terhadap aplikasi dan layanan berbasis *Smart Governance* pada Masyarakat Kota Samarinda sehingga partisipasi dan pengenalan layanan berbasis *Smart Governance* minim, Permasalahan Kedua berupa Kendala Teknis yang disebabkan minim anggaran untuk pengembangan layanan maupun aplikasi berbasis *Smart Governance* sehingga salah satu layanan *Smart Governance* yakni E-Warga ditarik dari *Playstore*, hal ini terjadi karena anggaran awal Samarinda *Smart City* dioptimalkan pada Proyek Revitalisasi Citra Niaga sebagai Pilar *Smart Branding*, serta adanya masalah berupa perawatan *server* yang kurang diperhatikan sehingga sering terjadi *Down* pada layanan berbasis *Smart Governance*, dan Permasalahan Ketiga, Infrastruktur pendukung dalam penerapan *Smart Governance* belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda yang berupa *Command Center* dan *Dashboard* Samarinda *Smart City*

oleh karenanya tidak terjadi intergrasi layanan *smart governance*, lalu masih ada beberapa wilayah dikota samarinda mengalami *Blank Spot* (Hilang Sinyal).

Dengan Demikian sesuai paparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa yang menjadi Faktor Penghambat Implementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan Samarinda *Smart City*?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab dalam Tahir (2014:55) mengutarakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah serta memuat tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Grindle dalam Subarsono (2013:93) menyatakan terdapat dua variabel yang secara fundamental memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan publik, yakni: Variabel Isi Kebijakan dan Variabel Lingkungan Kebijakan. Variabel isi kebijakan terdiri dari: Termuatnya kepentingan kelompok sasaran/target, Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana kebijakan/program, dan Sumberdaya yang dilibatkan. Variabel lingkungan kebijakan terdiri dari: Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga/intitusi yang berkuasa, dan Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Weimer dan Vining dalam Pasolong (2013:59) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga faktor umum yang memberikan pengaruh berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Adapun faktor tersebut terdiri atas: Logika Kebijakan, Hakekat Kerjasama, dan Ketersediaan Sumberdaya Manusia.

Smart City

Menurut Washburn dalam Esabella (2016:3) menerangkan bahwa Smart City merupakan penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota seperti: Administrasi kota, Pendidikan, Kesehatan, Keselamatan publik, Real Estate, Transportasi, dan keperluan kota lainnya. Keseluruhan penggunaannya saling terhubung, efisien, dan berbais cerdas.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional pada penelitian ini, yakni: Implementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan Samarinda *Smart City* merupakan penerapan manajemen tata kelola pemerintah secara cerdas melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi, layanan berbasis digital, prinsip keterbukaan, pola kolaboratif, efisien dan efektif menuju kota layak huni.

Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif, adapun yang menjadi Fokus Penelitian ialah: Faktor Penghambat Implementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan Samarinda *Smart City*. Penelitian ini juga mempergunakan Sumber Data yang terdiri atas: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer berasal dari hasil wawancara dengan *Key Informan* yakni Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Kota Samarinda dan hasil wawancara dengan Informan penelitian yang terdiri dari: Tim Samarinda *Smart City* berjumlah delapan Orang dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWUAP) berjumlah dua Orang. Teknik penentuan Sampel sumber data menggunakan *Purposive Sampling* dalam Sugiyono (2016:96). Sumber Data Sekunder diperoleh dari Laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen berkaitan dengan penerapan *Smart Governance*. Teknik Pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), dan Studi Dokumentasi (*Documentation*) dalam Sugiyono (2016:163- 167). Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan Analisis Data Model Interaktif dalam Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat Implementasi Smart Governance dalam Mewujudkan Samarinda Smart City

Hogwood dan Gunn dalam Syahrani (2015:92) menerangkan bahwa Implementasi Kebijakan dibagi menjadi dua yakni *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi tidak berhasil) kebijakan yang tidak terimplementasi merupakan kebijakan yang dijalankan tidak sesuai rencana sedangkan kebijakan yang tidak berhasil kebijakan telah dijalankan sesuai rencana namun terdapat kondisi eksternal dan internal yang tidak menguntungkan. Keseluruhan sebab demikian terjadi karena setiap kebijakan yang dikeluarkan mengandung resiko gagal. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data sekunder yang penulis temukan, bahwa terdapat dua faktor penghambat Implementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan Samarinda *Smart City*, yakni sebagai berikut:

a. Hambatan Internal Pemerintah Kota Samarinda

Penerapan *Smart Governance* memperoleh sejumlah kendala yang berasal secara internal pada lingkup Pemerintah Kota Samarinda, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1) Sumberdaya Operator kurang Aktif

Penerapan *Smart Governance* telah didukung dengan Tim Samarinda Smart City dan TWUAP, namun secara praktiknya dilapangan yang dilakukan oleh operator layanan dilevel Kelurahan ataupun pada instansi OPD dilingkup Pemerintah Kota Samarinda kurang interaksi dan responsif ketika memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Samarinda bahkan cenderung hanya melakukan pengarah singkat dan penjeles melalui petunjuk berupa browsur dan edaran yang tersedia. Kondisi tersebut terjadi karena anggapan bahwa masyarakat Kota Samarinda sudah terbiasa mengakses layanan internet dan memiliki perangkat Komunikasi berupa Gawasi/HP Cerdas sebagaimana yang dijelaskan dalam Variabel faktor Lingkungan Sosial dan Politik, tetapi kecakapan digital yang terbangun tentunya berbeda satu dengan lainnya. Penerapan *Smart Governance* tentunya turut menopang pilar lainnya dalam penyelenggaraan Samarinda *Smart City* terutama pilar *Smart People*.

2) Ego Sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyediaan anggaran perawatan aplikasi/website yang tersedia

Penerapan *Smart Governance* memiliki sumberdaya keuangan yang memadai didukung dengan ketersediaan anggaran sebagaimana yang dijelaskan pada Variabel Sumberdaya, namun penganggaran tersebut hanya terpusat menggunakan anggaran yang direncanakan oleh Diskominfo Kota Samarinda. Hal ini terjadi karena adanya anggapan dari OPD bahwa Aplikasi dan *Website* yang tersedia menjadi tanggungjawab dari Diskominfo khusus pada Bidang Aplikasi dan Layanan *E-Government*, justru dalam pemerikasaan rutin dan perawatan periodik (per tiga bulan) terhadap Aplikasi dan *Website* yang tersedia harus menjadi tanggungjawab OPD terkait sebab prioritas dan capain penggunaan anggaran oleh Diskominfo Kota Samarinda dalam penerapan *Smart Governance* sangat disesuaikan dengan rencana pengembangan *Smart Governance* yang tersusun pada *Masterplan* Samarinda *Smart City* 2017-2025 yang memiliki capaian tahun yang harus dipenuhi.

3) Kekurangan sumberdaya Prasarana pendukung lainnya

Penerapan *Smart Governance* memiliki kekurangan berupa kondisi jaringan internet Pemerintah Kota Samarinda hanya mampu mengintegrasikan layanan di tingkat kecamatan dan OPD dan belum menjangkau integrasi dengan jaringan internet ditingkat kelurahan dan puskesmas setempat. Selain itu Pemerintah kota Samarinda belum memiliki *Software Testing* dan *Web Tester* sebagai alat untuk menguji kelayakan dari aplikasi dan website yang tersedia.

b. Hambatan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda

Hambatan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda dimana *Penerapan Smart Governancem* memperoleh kendala yang beasal dari Lingkup Eksternal Pemerintah kota Samarinda, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

1) Budaya Apatis Masyarakat

Masyarakat Samarinda telah siap menerima layanan berbasis *Smart Governance* sebagaimana yang diterangkan pada variabel Faktor Lingkungan Sosial dan Politik, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat literasi digital yang rendah. Skor Indeks Literasi digital masyarakat Kota Samarinda berada pada nilai 2,45 dari range nilai 1 hingga 5 pada tahun 2021 dan 2022 (Laporan Tahunan Komisi Informasi Kalimantan Timur Tahun 2022) dan kondisi tersebut didukung dengan rendah minat baca buku yang berada dibawah dua jam (Tribun Kaltim.com, 14 maret 2022).

2) Integrasi layanan terhambat dengan Kebijakan Satu Data (One Data)

Penerapan *Smart Governance* mengalami kendala dalam proses integrasi layanan sebab adanya kebijakan Satu Data Nasional sesuai Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana data kependudukan nasional sedang dirapikan dan dimutakhirkan oleh Dirjenduk Capil RI. Sehingga penggunaan data kependudukan di level daerah perlu memperoleh rekomendasi dari Dirjenduk Capil RI dengan mempertimbangkan kesiapan *server* yang disediakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Tetapi guna menghadirkan integrasi layanan berbasis smart governance Diskominfo Kota Samarinda meluncurkan program Aplikasi Samarinda Santer (Satu Aplikasi Terintegrasi) melalui registrasi nomor aktif warga saamrinda yang terhubung dengan akun pribadi *WhatsApp*.

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan Samarinda *Smart City* secara umum telah berlangsung dengan baik dengan tolak ukur antara lain:
 - a. Dari segi Standar dan Ukuran Kebijakan, terdapat dokumen *Masterplan Samarinda Smart City* yang memuat secara jelas strategi penerapan *Smart Governance* menuju perbaikan manajemen tata kelola pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Kota Samarinda. Strategi penerapan tersebut merupakan turunan dari visi Samarinda *Smart City* yang juga berkesinambungan dengan misi kerja Diskominfo Kota Samarinda selaku penanggungjawab *Smart Governance*. Sejak 2020 pengukuran atau evaluasi mendalam telah dilakukan pada Pilar *Smart Governance* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
 - b. Dari segi Sumberdaya, telah mendapatkan dukungan yang optimal berupa: Sumber Daya Manusia berkompeten dengan berbagai latar belakang mengisi Tim Samarinda *Smart City* maupun pula mendapatkan dukungan dari Tim Walikota untuk Percepatan Akselerasi Pembangunan (TWUAP), anggaran telah terpenuhi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim, serta Program CSR Bank Indonesia perwakilan Kaltim walaupun hingga sejauh penggunaan anggaran masih

- bergantung kepada APBD Pemerintah Kota Samarinda, dan kelengkapan sarana serta prasarana berbentuk fisik dan nonfisik telah tersedia sebagai penunjang *Smart Governance*.
- c. Dari segi Komunikasi Antar Organisasi, Tim Samarinda *Smart City* dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWUAP) berasal dari berbagai unsur kepentingan maupun profesi yang beragam proses komunikasi dan koordinasi berlangsung dengan baik secara komunikasi formal dan nonformal, selain itu Diskominfo Kota Samarinda selaku penanggungjawab *Smart Governance* telah membangun aktivitas komunikasi publik pada masyarakat Kota Samarinda untuk memberikan penambahan wawasan dan pengenalan *Smart Governance*.
 - d. Dari segi Karakteristik Agen Pelaksana, nampak beberapa ciri tertentu dari agen pelaksana berupa: rincian pembagian tugas yang jelas pada tiap agen pelaksana yang terlibat dalam penerapan *Smart Governance* akibatnya pola kerja dianggap telah terbangun secara efektif dan tanggungjawab telah terbentuk secara kelompok maupun individual pada Tim Samarinda *Smart City* sehingga tiap anggota Tim Samarinda *Smart City* memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan *Smart Governance*.
 - e. Dari segi Disposisi Implementor, anggota Tim Samarinda *Smart City* memiliki kecenderungan berupa mendukung proses penerapan *Smart Governance* oleh karenanya respon dan pemahaman pada Tim Samarinda *Smart City* terbentuk dengan baik, sehingga ketika menghadapi kendala pada *Smart Governance* yang sifat teknis dan nonteknis dapat teratasi dengan baik.
 - f. Dari segi Lingkungan Sosial dan Politik, Penerapan *Smart Governance* sangat didukung dengan kesiapan masyarakat Samarinda yang memiliki akses komunikasi dan internet yang terbilang tinggi, Pemerintah Kota Saamrinda yang sangat mapan dalam menyiapkan layanan publik berbasis TIK, serta secara politik memperoleh dukungan penuh dari Walikota Samarinda maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan *Smart Governance*.
2. Faktor penghambat implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan Samarinda *Smart City* antara lain penghambat internal berupa sumberdaya operator kurang aktif, adanya ego sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu dalam penyediaan anggaran perawatan aplikasi/website, dan kekurangan sumberdaya prasarana pendukung, serta penghambat eksternal meliputi budaya apatis masyarakat dan pengembangan aplikasi maupun pengintegrasian terhambat oleh kebijakan pusat Satu Data (One Data).

Saran

- 1) Sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Diskominfo perlu melakukan pelatihan dan peningkatan *Skill* dari operator layanan yang berada

pada tingkat kelurahan dan OPD sesuai yang dijelaskan oleh Perwali No.9 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) didalam aturan tersebut memuat startegi pengembanga dan pelatihan Sumberdaya Manusia berupa Manajemen Pengetahuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, dan Manajemen Layanan.

- 2) Sebaiknya Diskominfo Kota Samarinda perlu mengembangkan kapasitas jaringan internet dilingkup Pemerintah Kota Samarinda dengan berbasis *Metropolitan Area Networking* (MAN) agar integrasi jaringan internet dan integrasi layanan berbasis *Smart Governance* dapat saling terhubung.
- 3) Sebaiknya Diskominfo Kota Samarinda juga perlu melakukan kembali Sosialisasi terkait layanan dan aplikasi berbasis *Smart Governance* bagi masyarakat Kota Samarinda dengan melibatkan bantuan Aparatur Kelurahan, tentunya juga dengan langkah tersebut ditujukan mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

Blueprint Samarinda Smart City 2019-2021

Esabella, Shinta. 2016. Menuju Konsep *Smart City*. *Makalah Kuliah Tamu* (Online), Universitas Teknologi Sumbawa (Diaskes 20 Oktober 2019) <https://kaltim.tribunnews.com/2018/02/14/budaya-membaca-dikaltim-masihrendah-warga-lebih-banyak-lakukan-ini> (Diaskes 18 April 2020)

Laporan Evaluasi Gerakan 100 *Smart City* Keminfo RI tahun 2018

Laporan Peringkat Penguatan Manajemen TIK Kalimantan Timur 2018

Laporan Tahunan Komisi Informasi Kalimantan Timur Tahun 2022

Masterplan Samarinda Smart City 2017-2025

Milles, Matthew, Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication Inc

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda *Smart City*

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Negara dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika

Tahir, Arifi. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta